

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran politik tentang etika politik Islam yang dikemukakan oleh Nurcholis Majid, M. Amien Rais dan Bahtiar Effendy. Pembahasan tema ini cukup relevan dibahas pada era saat ini karena di dalam kancah perpolitikan sekarang baik di tingkat daerah maupun nasional semakin merajalela praktik-praktik yang kurang beretika. Berbicara persoalan etika politik pada hakikatnya membahas persoalan norma dan kekuasaan. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Orang yang ingin hidup harmonis maka wajib mematuhi aturan atau ketentuan tersebut jika tidak ingin mendapatkan sanksi baik hukum atau sosial.¹

Peta politik di Indonesia cukup dinamis saat ini, peran yang dimainkan oleh aktor-aktor politik baik lokal maupun nasional, intrik-intrik politik yang dimainkan oleh aktor politik itu kadang kala banyak menimbulkan dinamika politik yang seringkali membuat gaduh keadaan politik di Indonesia. Kegaduhan politik di Indonesia itu kadang kala mencerminkan bagaimana kualitas diri dari para aktor politik tersebut. Setiap aktor politik yang berkontestasi dalam dunia politik di Indonesia seharusnya mempunyai kapabilitas, kapasitas, dan kualitas yang mumpuni, terutama bagaimana dia mempunyai kualitas baik dalam hal perbuatan, etika, dan lain sebagainya.

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. Ke 7, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 21.

Etika dalam berpolitik itu dibutuhkan bagi setiap aktor politik maupun orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Etika politik ini sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas diri dari setiap aktor politik itu. Ketika etika politik dari seorang atau sekelompok aktor politik itu dinilai bagus, secara tidak langsung itu akan membuat kondisi politik di Indonesia juga semakin berkualitas, maka dari itu lah pentingnya etika politik dalam peta politik di Indonesia.

Syahwat politik kadang kala melupakan etika-etika yang seharusnya terus di pegang erat oleh setiap politikus, karena pada dasarnya Politik erat kaitannya dengan kepentingan, dan setiap kepentingan itu akan mengakibatkan benturan antar aktor politik yang masing-masing juga membawa kepentingannya. Cinta akan materi dan tahta mewarnai pelaksanaan kegiatan politik di suatu Negara. Etika seakan hilang dan tidak berarti bila sudah berbicara tentang politik. Ambisi politisi dalam menjalankan kekuasaan politik memungkinkan adanya pergeseran tujuan dari yang semula untuk mensejahterahkan masyarakat menjadi mensejahterahkan individu atau kelompoknya saja.²

Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai etika tentunya dalam menjalankan kekuasaan politik perlu mematuhi dan menjalankan etika politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum politik Islam dan Pancasila sebagai fundamental bangsa. Ketidajelasan tindakan politik di Negara Indonesia menyebabkan keadaan publik menjadi kacau. Banyak kasus serta tindak penyimpangan politik yang

² <https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/hikmah/-etika-politik-dalam-islam> pada 10 oktober 2018 Pukul 17:05 WIB

terjadi disebabkan ketidakpahaman politisi terhadap etika politik. Hal ini menyebabkan pandangan betapa sulitnya mewujudkan pelaksanaan kegiatan politik yang bersih dan beretika.

Dengan maraknya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, hal ini bisa dikatakan sebagai penyebab turunnya moral dan etika bangsa saat ini. Dengan budaya asing yang masuk ke negara kita sekarang ini, banyak orang menganggap bahwa materialisme adalah hal yang biasa. Tumbuhnya budaya materialisme bisa dilihat dari banyaknya orang-orang yang sangat memperhatikan gaya hidup yang terkesan mewah tanpa memperdulikan orang-orang sekitar. Tidak terkecuali dalam hal politik, dalam hal perpolitikan etika sering dilupakan dalam bertindak,. Maka untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memerlukan perwujudan politik yang beretika sesuai dengan prinsip-prinsip umum politik Islam dan sesuai Pancasila sebagai dasar negara.³

Persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena berbagai alasan. Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan dengan *lillahi taala*. Dalam berpolitik, kita tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ibadah dapat merusak "kesucian" politik.

³ Makalah: *Etika Politik di Indonesia* oleh Dewi Siska Yanti Surabaya Desember 2014, h. 3

Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antarmanusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip hubungan antarmanusia yang harus berlaku di dalam dunia politik.⁴

Siapa pun yang terjun dalam bidang politik pasti memiliki kepentingan kekuasaan. Kekuasaan di mata Islam bukanlah hal terlarang, sebaliknya kekuasaan politik dianjurkan selama tujuannya untuk menjalankan visi-misi kekhilafahan. Untuk itu kekuasaan harus didapatkan dengan tetap berpegang pada etika Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan panduan etika dalam kehidupan manusia. Karena itu etika dalam politik menjadi suatu keharusan.

Fakta memperlihatkan bahwa tidak sedikit yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antarkelompok dalam kalangan elite politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bahkan berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan, jika tidak ada kesepakatan bersama.

Mestinya ketika membahas tentang etika politik saat ini tidak dipandang seperti berteriak di padang pasir yang tandus dan kering. Sementara realitas politik itu sebenarnya pertarungan antara kekuatan dan kepentingan yang tidak

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/hikmah/-etika-politik-dalam-islam>. Diakses Pada 09 Oktober 2018. Pukul 20:22 WIB

ada kaitan dengan etika. Politik dibangun bukan dari yang ideal dan tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara seperti yang diajarkan oleh Machiavelli. Sementara Immanuel Kant menyebutkan bahwa ada dua watak yang terselip di setiap insan politik, yaitu watak merpati dan watak ular.

Pada satu sisi insan politik memiliki watak merpati yaitu memiliki sikap lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, tetapi di sisi lain juga memiliki watak ular yang licik dan selalu berupaya untuk memangsa merpati. Jika watak ular yang lebih menonjol daripada watak merpati, inilah yang merusak pengertian politik itu sendiri yang menurut filosof Aristoteles bahwa politik itu sendiri bertujuan mulia. Untuk itulah pentingnya etika politik sebagai alternatif untuk mewujudkan perilaku politik yang santun.⁵

Pemikiran Aristoteles sejalan dengan konteks pemikiran Islam, Al-Ghazali yang tidak memisahkan antara etika dan politik, keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya akan menentukan nilai baik-buruk atau benar-salah dari setiap tindakan dan keinginan masyarakat. Maka politik sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral, bertanggung jawab, dan mengerti akan hak serta kewajibannya dalam hubungan kemasyarakatan secara keseluruhan.⁶

Di sini terlihat Islam sebagai *way of life* (pandangan hidup) yang baik dan memiliki *moral code* atau *rule of conduct* dalam melayani rakyat. Islam

⁵ *Aceh.tribunnews.com* diakses pada 11 oktober 2018 Pukul 17:25 WIB

⁶ Abubakar, Fauzi. 2018. *Etika Politik Islam Menurut Islam* diambil dari serambinews.com diakses pada 10 oktober 2018

datang dengan *resource* yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan dipertegas dengan Sunnah Nabi. Al-Quran sebagai dasar bagi manusia kepada hal-hal yang dilakukan memberikan tekanan-tekanan atas amal perbuatan manusia (*human action*) dari pada gagasan. Artinya Al-Quran memperlakukan kehidupan manusia sebagai keseluruhan aspek yang organik, semua bagian harus dibimbing dengan petunjuk dan perintah-perintah etik yang bersumber dari wahyu, yang mengajarkan konsep kesatuan yang padu dan logis.⁷

Dalam etika politik yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari masyarakat karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara pandangan seseorang (etika individual) dengan tindakan kolektif membutuhkan perantara yang berfungsi menjembatani kedua pandangan ini berupa nilai-nilai. Melalui nilai-nilai inilah politikus berusaha meyakinkan masyarakat agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Karena itu, politik disebut juga seni meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi dan kekerasan.

Nilai-nilai kebenaran Etika politik merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab atas realitas kehidupan. Untuk itu realitas politik diupayakan dengan mengkonsepkan dan mengelaborasi secara mendalam fenomena terhadap pandangan Al-Quran tentang etika dalam pelayanan rakyat.

⁷ Abubakar, Fauzi. 2018. *Etika Politik Islam Menurut Islam* diambil dari serambinews.com diakses pada 10 oktober 2018

Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang memberikan kontribusi pemikirannya terkait etika berpolitik diantaranya cendekiawan Islam yang produktif dalam merespon persoalan moral politik di Indonesia adalah Nurcholish Madjid, M. Amien Rais, dan Bachtiar Effendy yang menuangkan pemikirannya secara tertulis dalam bentuk artikel, makalah maupun esai yang dibukukan. Seperti salah satu pemikiran Nurcholis Majid yaitu konsep etika politik dalam buku *Fatsoen*. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kaum elit politik menanggung beban yang berat dalam masyarakat yaitu tanggung jawab menjaga moralitas dan etika sosial, dengan cara menarik pelajaran dari lingkungan hidupnya.⁸

Menurut Nurcholish Madjid, dalam kehidupan politik kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik.⁹

Muhammad Amien Rais dikenal luas sebagai pakar politik dan, populer sebagai salah satu seorang "tokoh reformasi" yang dengan gigih dan konsisten bersama para tokoh reformis lainnya berhasil menumbangkan kekuasaan orde baru, memiliki konsep-konsep yang soluktif. Di antara dalam satu pemikirannya, dia mengatakan bahwa ada hubungan organik yang sangat erat antara peran umat Islam dalam berdakwah dan politik. Semboyan dakwah

⁸ Nurcholish Madjid, *Fatsoen Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Republika, 2002), h. i.

⁹ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Tabloid Tekad dan Paramadina, 1999), h. 52.

amar ma-ruf nahi munkar itu mengajak umat Islam untuk menganjurkan kebajikan, mendorong kebajikan, sekaligus mencegah kejahatan atau kemunkaran. Dakwah yang seperti kita ketahui bersifat multi dimensional, dalam arti dakwah adalah sebuah rekonstruksi sosial agar tercapai kehidupan yang lebih baik di masa depan dibandingkan dengan yang ada sekarang ini.

Menurut M. Amien Rais masalah hukum, budaya, ekonomi, sosial, terkhusus politik harus bertumpu pada etika dan moral pada yang tauhi. Artinya, tauhid adalah sumbu kehidupan kita, dan tauhid jelas menurunkan seperangkat nilai moral dan etika yang jelas, menjadi basis bagi pengembangan dan pengelolaan seluruh kehidupan muslim di dunia modern ini.¹⁰

Sehingga praktek etika keagamaan dalam dinamika politik dan demokrasi merupakan jalan yang paling strategis bagi tujuan yang dicita-citakan, yaitu suatu kondisi kehidupan bernegara yang bersumber pada prinsip-prinsip dasar ajaran moralitas islam. Oleh sebab itu, etika dan moralitas umat islam dalam berpolitik mempunyai fungsi kontrol dan pendorong terciptanya masyarakat madany yang didambakan rakyat Indonesia.

Bahtiar Effendy adalah seorang tokoh pakar dan pengamat politik sekaligus dosen UIN Syarifhidayatullah. Menurut Bahtiar Effendy di Indonesia, dalam hal hubungan politik dengan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik rezim Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang politik yang berlandaskan Islam sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis, yang lebih

¹⁰ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial*, (Bandung: Mizan,, 1998), h, 79.

menyedikan lagi Islam politik seringkali menjadi sasaran tembak ketidakpercayaan, yang dicurigai menentang ideologi negara pancasila

Dari latar belakang di atas peneliti melihat ini penting untuk diteliti, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait pola pemikiran tentang etika politik yang bertema: Etika Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Nurcholish Majid, M. Amien Rais, dan Bachtiar Efendi).

B. Pembatasan Masalah

Dari uraian diatas perlu melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah. Pembahasan dalam tulisan ini hanya terfokus pada etika politik Islam menurut 3 (tiga) tokoh yakni Nurcholis Majid, M. Amien Rais dan Bachtiar Efendi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Etika Politik Islam menurut Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bahtiar Effendy ?
2. Bagaimana Perbandingan Etika Politik menurut Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bahtiar Effendy ?
3. Bagaimana signifikansi pemikiran ketiga tokoh terhadap perpolitikan di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Konsep Etika Politik Islam Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bahtiar Effendy.
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Etika Politik Islam Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bahtiar Effendy.
3. Untuk Mengetahui Signifikansi Pemikiran Ketiga Tokoh Terhadap Perpolitikan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kerjasama program studi Politik Islam.
2. Menambah wacana ilmu pengetahuan dan penelitian dalam konsep etika politik islam Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bahtiar Efendi dalam tinjauan konsep demokrasi untuk diteruskan dalam penelitian lainnya yang relevan.
3. Menambah wacana ilmu pengetahuan etika politik Islam di masa demokrasi yang kemudian bisa di aktualisasikan pada konstelasi politik daerah maupun nasional.
4. Sebagai sumbangan dan sekaligus pengembangan khazanah keilmuan dibidang fiqh syiasah dalam konteks etika prilaku politik
5. Memberikan pemahaman bahwa dalam konteks politik terdapat etika yang perlu dijaga maupun dalam paham politik demokrasi representatif.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu menyelesaikan dan menghindari kesamaan penulisan atau *plagiatisme* penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tinjauan-tinjauan yang berkaitan dengan pembahasan. Berikut ini penulis sampaikan beberapa tinjauan buku dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini antar lain :

Pertama, buku “Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”, karya Prof. Dr. Franz Magnis Suseno. Buku ini mengenai pola kenegaraan modern berkembang bersamaan dengan revolusi ekonomi, sosial dan budaya yang berlangsung di Eropa Barat tiga ratus tahun yang lalu dan mendapat ungkapan yang paling mengesankan dalam perwujudan masyarakat industrial dan pasca-industrial masa kini. Salah satu inti politik dewasa ini menyangkut legitimasi kekuasaan. Klaim-klaim negara modern yang bercorak multidimensional dan kontroversial menuntut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan politik, baik dalam dimensi hukum maupun kekuasaan.¹¹

Kedua, buku karya Drs.Ayi Sofyan,M.Si yang berjudul “Etika Politik Islam”, diterbitkan di Bandung oleh CV.Pustaka Setia. Buku ini berisi penjelasan mengenai etika politik yang pada dasarnya merupakan bagian dari filsafat politik, yang dalam buku ini ditekankan bahwa filsafat itu lebih ke arah kebijaksanaan hidup, sikap hati dan sistem nilai. Akan tetapi filsafat disini tidak diartikan sebagai kebijaksanaan hidup, sikap hati, sistem nilai, pandangan dunia, usaha kebatinan, atau cita-cita mengenal hal-hal yang luhur, tetapi dalam

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Kenegaraan Modern*, (Jakarta, PT. Gramedi Pusaka Utama, th 2015).

arti ilmiah yang berciri akademis dan bersumber pada realitas. Didalam buku ini menjelaskan ketika filsafat dihubungkan dengan politik, ia akan melahirkan filsafat politik.¹²

Ketiga, buku “Etika Politik Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam” yang ditulis oleh Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. dalam buku ini etika politik yang menjadi topik utamanya digali dari nilai-nilai ajaran islam utamanya implementas akhlak dalam kehidupan, mulai dari akhlak pribadi, akhlak sosial, hingga akhlak politik menuju tatanan etika poltik yang bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mempraktikan etika politik yang bersih, cerdas, dan santun. Islam menjadi pendorong bagi umatnya untuk tampil paling depan membawa kemajuan dan kesejahteraan.¹³

Keempat, buku Beni Susetyo dengan judul “Hancurnya Etika Politik”. Benny Susetyo adalah seorang passtor dan juga seorang advokat terhadap masyarakat lemah, korban bencana serta korban kekerasan. Baginya peradaban adalah persoalan terpenting di Indonesia. Dan sangatlah ironis sekali ketika bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa berbudaya luhur justru tengah menderita sakit peradaban yang parah. Hal ini sudah tentu berakibat pada hilangnya keluhuran budi pekerti karena digantikan oleh segala bentuk kecurangan, penipuan dan semua hal yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Buku ini mengupas hancurnya peradaban bangsa Indonesia dari sudut

¹² Ayi Sofiyani, *Etika Politik Islam* (Bandung, CV. Pustaka Setia, th 2012)

¹³ Herman Khaeron, *Etika Politik : Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam* (Bandung, Nuansa Cendekia, Th 2013)

etika politik dan tindak-tanduk para politikus dengan semua sepak terjangnya dalam masyarakat.¹⁴

Kelima, buku Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir, M.S. Dengan Judul “Moral Dan Etika Elite Politik”. Buku ini mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan moralitas elit politik. Nanat Fatah Natsir mengemukakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi politik. Buku ini juga memaparkan kondisi moralitas dan etika elite politik dan permasalahannya saat ini, dan serta membahas konsep pengembangan moral-moral dan etika elite politik yang berdasarkan Pancasila guna mengatasi krisis kepercayaan.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Yunus Rahawarin dengan judul “Membaca Pemikiran Arkoun Tentang Etika Politik Islam”, dari jurnal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemikiran politik Arkoun tentang negara Madinah yang dibangun Nabi pada awal Islam adalah negara yang ideal sesuai zaman pada waktu itu dan tidak relevan untuk kehidupan saat ini, menurutnya dunia sudah mengalami perubahan yang sangat besar dan pesat melalui babak sejarah yang panjang, untuk itu bagi negara-negara Islam perlu mengkaji ulang sistem pemerintahan untuk disesuaikan dengan perkembangan di era modern dan menyesuaikan dengan kultur budaya setempat. Untuk mewujudkan etika politik yang sehat dan santun sesuai ajaran Islam, diperlukan upaya dari semua pihak

¹⁴ Benny Susetyo, *Hancurnya Etika Politik*, (Jakarta, Buku Kompas, th 2002)

¹⁵ Nanat Fatah Natsi, *Moral Dan Etika Elite Politik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, th 2015)

utamanya dari ilmuwan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan wewenang yang diamanatkan.¹⁶

Skripsi yang di tulis oleh Syarifuddin Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan Judul “Etika Politik Islam Dalam Pemilu”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan menggunakan teori etika politik Islam sebagai pisau analisa yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan yang berlaku di Indonesia saat ini ternyata masih mampu mengikuti etika politik yang berlaku, walaupun dengan adanya sedikit pembaharuan yang menyesuaikan dengan adanya perubahan zaman. Sistem pemilihan dalam etika politik Islam juga tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem pemilihan yang berlaku sekarang ini, kecuali apabila ada beberapa pelaku politik yang melaksanakan pemilihan ini dengan melanggar norma dan aturan yang telah berlaku.¹⁷

Skripsi oleh Asep Sholahudinn fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dengan judul “Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khladun”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka,dengan menggunakan teori etika politik Islam sebagai pisau analisa yang bersifat deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bagi Ibnu Taimiyah, Mengurusi umat manusia itu tergolong kewajiban agama yang benilai besar. Bahkan agama tidak bisa ditegakan kecuali

¹⁶ Yunus Rahawarin, Jurnal: *Membaca Pemikiran Arkoun Tentang Etika Politik Islam* Vol. 20, No. 1. Th. 2016.

¹⁷ Syarifuddin, Skripsi : “*Etika Politik Islam Dalam Pemilu*” : (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2012).

dengannya. Hal itu juga di perkuat dengan pendapat Ibnu Khaldun yang melihat bahwa manusia memiliki watak yang suka menyerang antara satu dengan lainnya. Karena itu, untuk menolak dan mencegah sikap sewenang-wenang manusia atas manusia yang lain diperlukan pemimpin. Ia adalah orang yang paling kuat dan disegani oleh kelompoknya, sehingga dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan manusia tersebut. Dialah yang disebut dengan raja atau kepala atau khalifah.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Sugiyono Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Konsep Etika Politik Dalam Persepektif Ali Syari’ati”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan historis. Dari penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan analisa konsep etika Ali Syari’ati yang berpendapat politik merupakan sistem pemerintah yang mempunyai tanggung jawab memelihara agar masyarakat bisa aman dan menyediakan sarana-sarana kesejahteraan bagi warganya. Dengan demikian beliau memandang bahwa peran negara bukan hanya dalam bidang administrasi, namun juga peran-peran etis untuk membangun masyarakat dan negara yang bermoral. Meskipun Ali Syariati tidak mendefinisikan secara jelas tentang etika politik, namun dalam konsep politik Syariati menunjukkan landasan etika politik dalam mendefinisikan politik. Hal ini dapat dilihat dari konsep negara

¹⁸ Asep Sholahudinn, Skripsi: *“Etika Politik Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun”* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, 2014).

Syariat yang mempunyai arti birokrasi atau administrasi dan tanggung jawab kenegaraan untuk mendidik atau memperbaiki pandangan hidup masyarakat.¹⁹

G. Kerangka Teori

Etika politik merupakan suatu tema yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia tidak hanya menjadi sebuah acuan, konsep ideal semata. Seyogyanya, etika politik bisa menjadi panduan serta diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, etika politik yang dicontohkan oleh banyak pejabat publik sungguh sangat jauh dari apa yang ideal. Etika secara umum yang kita mengerti sebagai apakah suatu perkataan ataupun perbuatan tersebut baik atau buruknya. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat istiadat yang umum dan kesatuan sosial tertentu.²⁰

Untuk itulah dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori dari Aristoteles, yang sebagaimana Aristoteles mengungkapkan bahwasannya, politik berhubungan dengan etika. Politik sangat bersifat etis, menjunjung prinsip-prinsip etis/moral, mengejar nilai-nilai etis/moral, dan membelanya. Pembukaan bukunya “politics” sangat mengandaikan dan berkaitan dengan pembukaan bukunya “Nicomachean Ethics”. Jika dalam buku etikanya, kebaikan adalah tujuan atau keterarahan dari segala aktivitas kehidupan manusia, dalam buku politiknya, polis adalah cetusan paling tinggi dari

¹⁹ Sugiyono, Skripsi: “*Konsep Etika Politik Dalam Persepektif Ali Syari’ati*” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, 2016).

²⁰ Riyanto, Eko Armada, *Filsfat Etika Politik: Diskursus Konteks Indonesia, Diktat Kuliah Filsafat Politik*, (Malang : STFT Widya Sassana, 2007).

aktivitas hidup manusia dalam menggapai kesempurnaan dan kebaikan sosialitasnya. Hubungan antara politik dan etika bersifat timbal balik, yaitu etika terarah kepada pembentukan tata kehidupan bersama yang baik dalam politik, dan politik mengandaikan fondasi etis yang benar.²¹

Dalam dua tulisan di atas terlihat dengan jelas hubungan antara etika dan politik dalam pemikiran Aristoteles. Etika membahas perihal perbuatan manusia, “*every craft investigation, and decision*”, dan politik menekuni perkara tata hidup bersama, “*every city, a species of association*”. Setiap tindakan manusia maupun tata hidup bersama mengejar kebaikan, “*aims at some good*”. Pada politik, yang dikejar bukan saja “kebaikan personal” sebagaimana setiap orang yang bertindak mengejar kebaikan, tetapi kebaikan tertinggi yaitu kebaikan bersama. Dalam bahasa politis, ide ini mendapat nama *bonum commune*. Disebut kebaikan tertinggi, karena kebaikan seperti yang diupayakan dalam politik mengatasi kebaikan-kebaikan personal. Dalam “*Nicomachean ethics*”, segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas selalu menuju kepada suatu kebaikan (etika). Dalam Politics, persekutuan aktivitas hidup bersama apapun juga lahir dan dibangun dengan tujuan menggapai pada tujuan kebaikan pula. Karena polis merupakan persekutuan puncak hidup bersama, maka tujuannya pastilah untuk mengejar kebaikan paling tinggi atau *the most sovereign of all goods*. Dengan demikian, politik adalah sistem tata hidup bersama dalam polis tunduk pada dan mengandaikan etika kebaikan

²¹ Riyanto, Eko Armada, *Filsfat Etika Politik: Diskursus Konteks Indonesia*, Diktat Kuliah Filsafat Politik, (Malang : STFT Widya Sassana, 2007).

sekaligus merupakan puncak kesempurnaan cetusan etika. Etika adalah pendasaran dari politik.²²

Bagi Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial, makhluk hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi penyempurnaan dirinya, diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk itu diperlukan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain.²³

Menurut Aristoteles, dalam prakteknya, pemerintahan yang paling baik adalah politeia yang bersifat demokratis-moderat, atau demokrasi dengan undang-undang dasar, sebab hak memilih dan hak dipilih bukan ada pada semua orang, melainkan pada golongan tengah, yang memiliki senjata dan yang telah biasa berperang. Bentuk pemerintahan ini memberi jaminan yang terkuat, bahwa pemerintahan akan bertahan lama dan akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan.²⁴

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian analitis deskriptif. Artinya metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara obyektif materi yang akan dibahas. Metode analitis digunakan untuk mendapat dan mengetahui implikasi dari ide etika politik islam yang ada dalam konsep demokrasi.

1. Jenis penelitian

²² *Ibid.*

²³ *Op.Cit*, Riyanto, Eko Armada, *Filsfat Etika Politik.*

²⁴ *Op.Cit*, Riyanto, Eko Armada, *Filsfat Etika Politik.*

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian. Peneliti ini lebih menuntut kejelasan penelitian serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat obyek penelitian menyangkut kajian pemikiran, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan dengan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁵

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan kedua sumber sekunder.²⁶

Adapun rincian masing-masing sumber adalah:

- a. *Data Primer* disandarkan pada literatur buku-buku yang ditulis oleh tokoh yang diteliti.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet ke XVI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), h.73

²⁶ *Ibid.*, h. 74

- b. *Data sekunder* merupakan sumber pendukung dari primer yang berasal dari kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Resarch*) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang ada dipergustakaan, baik berupa arsip, buku, dokumen, majalah maupun lainnya.²⁷

5. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap penetapan hasil temuannya. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan pokok-pokok permasalahan secara menyeluruh: komparatif yaitu sebuah metode perbandingan dengan cara menganalisa data-data yang ada, kemudian penulis kombinasikan untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang padu.

²⁷ Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I. (Jakarta: UI Pres. 1993), h. 37

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab bahasan, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang berisikan kajian teoritis yang digunakan penulis untuk membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yakni gambaran umum yang berkaitan dengan judul peneliti mulai dari pengertian etika, penjelasan tentang etika politik serta membahas etika politik dalam islam.

BAB III : Biografi singkat dari ketiga tokoh (Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bahtiar Effendy)

BAB IV : Pembahasan konsep serta analisis pemikiran ketiga tokoh (Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bachtiar Effendy).

BAB V : Sebagai penutup bagi seluruh rentetan pembahasan sebelumnya, menuliskan kesimpulan dan saran yang dapat penulis ambil dan beberapa gagasan penulis yang dituliskan oleh penulis.